

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *State of The Art*

Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Pemaparan tersebut ditujukan untuk mempertegas posisi penelitian serta mengidentifikasi perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Studi terdahulu menjadi rujukan yang sangat penting sebagai bahan perbandingan. Dengan demikian, penelitian terdahulu yang sudah ada akan menjadi pijakan penting dan pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai Implementasi Program Ayo Belajar Di Perpustakaan (Ajar Pustaka) Daerah Kabupaten Purbalingga :

1. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Miftahur Rizki dan Hikmatu Ruwaida (2022) dengan judul Peran Perpustakaan Daerah dalam Membangun Budaya Literasi Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran perpustakaan daerah dalam meningkatkan budaya literasi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *narrative research*, serta menggunakan teknik pengumpulan data dari penelitian berupa wawancara dan observasi serta di analisis dengan reduksi data, *display* data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan peran perpustakaan dalam membangun budaya literasi masyarakat kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu dengan mengadakan *storytelling*, lomba bercerita, perpustakaan keliling, memberikan penghargaan kepada pengunjung, mengembangkan aplikasi iHSU, dan sebagai fasilitator komunitas literasi.
2. Penelitian ini dilakukan oleh Erlina Nur Azizah dan Nida Handayani (2025) dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan Perpustakaan Daerah di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas layanan perpustakaan daerah di Kota Depok menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini mengacu pada lima dimensi teori

Prasuraman, yaitu *Responsiveness*, *Assurance*, *Tangible*, *Empathy*, dan *Reliability*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan berhasil memberikan layanan yang akurat, tepat waktu, dan konsisten sesuai dengan SOP yang ketat dan evaluasi rutin, mencerminkan tingkat keandalan yang tinggi.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Fitriani Suardi (2022) dengan judul Sinergi Perpustakaan Daerah Kabupaten Takalar Dengan Taman Baca Masyarakat (TBM) Dalam Peningkatan Literasi Pemuda Desa Campagaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Sinergi Perpustakaan Daerah Kabupaten Takalar dengan Taman Baca Masyarakat (TBM) dalam Peningkatan Literasi Pemuda Desa Campagaya dan faktor apa yang menyebabkan Sinergi Perpustakaan Daerah Kabupaten Takalar Dengan Taman Baca Masyarakat (TBM) dalam Peningkatan Literasi Pemuda Desa Campagaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan informan yang berjumlah tujuh orang diantaranya lima dari pengelola Taman Baca Masyarakat (TBM) Desa Campagaya dengan dua orang dari Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Takalar yaitu metode yang sifatnya memberikan gambaran atau penjelasan tentang bagaimana Sinergi antara TBM Desa Campagaya dengan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Takalar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sinergi Perpustakaan Daerah Kabupaten Takalar Dengan Taman Baca Masyarakat (TBM) dalam Peningkatan Literasi Pemuda Desa Campagaya sudah sangat baik.
4. Penelitian ini dilakukan oleh Vivi Friskila Angela (2024) dengan judul Implementasi Kebijakan Perpustakaan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Minat Baca Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi dan kinerja kebijakan tentang perpustakaan dalam upaya peningkatan minat baca yang dimiliki masyarakat di Kota Palangka Raya. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, serta

dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat implementasi dan kinerja kebijakan tentang perpustakaan di Kota Palangka Raya berjalan dengan baik yaitu SDM berkompeten dibidang perpustakaan, pelayanan yang memuaskan, sarana dan prasarana yang dimiliki sudah memadai.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Haza Efrinandes dan Fitri Handayani (2025) dengan judul Peran Perpustakaan Kota Sungai Penuh dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran Perpustakaan Kota Sungai Penuh dalam meningkatkan literasi masyarakat desa Kota Sungai penuh. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun analisis data yang digunakan dengan tiga cara yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Perpustakaan Kota Sungai Penuh dalam meningkatkan literasi masyarakat desa yaitu: 1) Literasi dasar: Perpustakaan Kota Sungai Penuh tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca dan meminjam buku, tetapi juga sebagai pusat pengembangan literasi dasar bagi anak-anak serta destinasi wisata edukasi bagi anak usia dini (PAUD/TK); 2) Klub baca: Perpustakaan Kota Sungai Penuh melaksanakan kegiatan pelatihan kepada para pengelola perpustakaan Desa untuk menggerakkan kegiatan pojok baca Desa; 3) Pelatihan literasi: Adanya kegiatan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dari Perpustakaan Kota Sungai Penuh diharapkan dapat memberi masyarakat desa peluang untuk meningkatkan literasi dan minat baca Masyarakat; dan 4) Kerjasama dengan komunitas: Dinas Perpustakaan Kota Sungai Penuh sebelumnya bekerja sama dengan komunitas Volunteer Anak Kincai untuk meningkatkan literasi anak-anak yang ada di desa Kota Sungai Penuh.
6. Penelitian ini dilakukan oleh Siti Nur Rndiyah (2024) dengan judul Manajemen Strategi Perpustakaan Daerah Dalam Meningkatkan Budaya

Literasi Masyarakat Di Kabupaten Kendal Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen strategi dan hasil dari manajemen strategi perpustakaan daerah dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat Kabupaten Kendal. Metode kualitatif dipilih sebagai metode penelitian dengan teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan dalam peningkatan budaya literasi adalah melalui pengoptimalan program dan pelayanan yang menyeluruh di wilayah Kabupaten Kendal berdasarkan kebutuhan pemustaka.

7. Penelitian ini dilakukan oleh Deswita Apriliya dan M. Nasihudin Ali (2024) dengan judul Upaya Perpustakaan Umum Kota Tebing Tinggi Dalam Peningkatan Literasi Informasi Melalui Program Ngopi Literasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengenali apakah sebuah program ini bisa meningkatkan budaya gemar membaca serta literasi informasi kepada para warga Kota Tebing Tinggi yang sudah menjajaki aktivitas ini baik dari sisi fasilitas serta prasarana uraian kegiatan. Metode pengumpulan informasi dilaksanakan dengan wawancara, observasi serta riset literatur. Hasil dari riset ini menampilkan kalau Bibliotek Universal Kota Tebing Tinggi berfungsi berhasil dalam meningkatkan literasi Informasi serta aktivitas gemar membaca warga Kota Tebing Tinggi.
8. Penelitian ini dilakukan oleh Rheza Ega Winastwan dan Annisa Nur Fatwa (2020) dengan judul Strategi Perpustakaan Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Literasi Budaya Masyarakat. Artikel ini membahas mengenai bagaimana strategi yang dilakukan oleh perpustakaan Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan literasi budaya masyarakat. Kajian ini merupakan studi kepustakaan dimana pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sumber rujukan yang memiliki informasi terkait dengan topik yang dibahas pada artikel ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh perpustakaan Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan literasi budaya masyarakat

meliputi, menyediakan layanan khusus perpustakaan yang memuat koleksi *local content* dan melakukan kerjasama dengan instansi lain.

9. Penelitian ini dilakukan oleh Nayla Meilany Putri, Widya Listiawati dan Ichsan Fauzi Rachman (2024) dengan judul Pengaruh Literasi Digital Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Konteks SDGS 2030. Penelitian ini menggunakan metode literature review. Jenis penelitian yang melibatkan analisis dan sintesis dari berbagai sumber yang relevan dengan topik yang diteliti. Hasil dari Penelitian ini menekankan pentingnya literasi digital dalam mendukung dan mencapai agenda SDGs 2030.
10. Penelitian ini dilakukan oleh Novia Tirta Sari, Nandang Rukanda dan Dewi Safitri Elshap (2024) dengan judul Peran Perpustakaan Dalam Meningkatkan Literasi Informasi Masyarakat Di Perpustakaan Desa Padalarang. Tujuan dari penelitian adalah: (1) Untuk mengetahui program pada Perpustades Padalarang; (2) Untuk mengetahui bagaimana kondisi literasi informasi masyarakat sebelum dan sesudah dengan adanya Perpustades Padalarang; (3) Untuk mengetahui bagaimana dukungan pemerintah dalam meningkatkan literasi informasi masyarakat di Perpustades Padalarang. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan wawancara terhadap dua subjek penelitian yang ditentukan berdasarkan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan, teknik analisis data menggunakan pendekatan triangulasi sebagai uji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi informasi masyarakat di Perpustakaan Desa Padalarang yaitu sebagai pembantu dan pendukung masyarakat dalam pengembangan kualitas hidup agar menjadi pribadi yang mandiri, melek terhadap ilmu pengetahuan, komunikasi dan informasi, serta berpotensi dimasa mendatang.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Miftahur Rizki dan Hikmatu Ruwaida (2022)	Peran Perpustakaan Daerah dalam Membangun Budaya Literasi Masyarakat	Sama-sama membahas peran perpustakaan dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat menggunakan pendekatan kualitatif.	Penelitian ini berfokus pada kegiatan literasi umum di Hulu Sungai Utara, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi inovasi program pelayanan publik berbasis literasi di Purbalingga yaitu Ajar Pustaka.
2	Erlina Nur Azizah dan Nida Handayani (2025)	Analisis Kualitas Pelayanan Perpustakaan Daerah di Kota Depok	Sama-sama mengkaji kinerja dan kualitas layanan perpustakaan daerah.	Penelitian ini menilai kualitas layanan menggunakan teori Prasuraman,

			sedangkan penelitian penulis menilai implementasi program Ajar Pustaka menggunakan teori implementasi Mazmanian & Sabatier (1983).
3	Fitriani Suardi (2022)	Sinergi Perpustakaan Daerah Kabupaten Takalar Dengan Taman Baca Masyarakat (TBM) Dalam Peningkatan Literasi Pemuda Desa Campagaya	Sama-sama menyoroti kolaborasi perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat. Fokus penelitian Fitriani pada sinergi antar lembaga (perpustakaan dan TBM), sedangkan penelitian penulis berfokus pada inovasi program Ajar Pustaka yang dijalankan Dinas

				Kearsipan dan Perpustakaan Purbalingga.
4	Vivi Friskila Angela (2024)	Implementasi Kebijakan Perpustakaan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Minat Baca Masyarakat	Sama-sama membahas implementasi kebijakan perpustakaan dan kaitannya dengan peningkatan literasi atau minat baca masyarakat.	Penelitian Vivi menelaah implementasi kebijakan di Palangka Raya, sedangkan penelitian penulis menekankan aspek inovasi program Ajar Pustaka sebagai bentuk implementasi kebijakan di Purbalingga.
5	Haza Efrinandes dan Fitri Handayani (2025)	Peran Perpustakaan Kota Sungai Penuh dalam	Sama-sama membahas peran perpustakaan dalam	Penelitian Haza menitikberatkan pada literasi dasar



		Meningkatkan Literasi Masyarakat Desa	memberdayakan masyarakat melalui kegiatan literasi.	dan pelatihan desa, sedangkan penelitian penulis berfokus pada inovasi layanan publik dan peningkatan literasi masyarakat secara luas melalui program Ajar Pustaka.
6	Siti Nur Rndiyah (2024)	Manajemen Strategi Perpustakaan Daerah Dalam Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat Di Kabupaten Kendal Tahun 2024	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat strategi perpustakaan dalam meningkatkan literasi.	Penelitian Siti menitikberatkan pada manajemen strategi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi program Ajar Pustaka sebagai

				wujud nyata strategi pelayanan publik.
7	Deswita Apriliya dan M. Nasihudin Ali (2024)	Upaya Perpustakaan Umum Kota Tebing Tinggi Dalam Peningkatan Literasi Informasi Melalui Program Ngopi Literasi	Sama-sama meneliti program inovatif perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat.	Penelitian Deswita mengkaji program Ngopi Literasi, sedangkan penelitian penulis menganalisis implementasi program Ajar Pustaka dengan pendekatan teori implementasi kebijakan.
8	Rheza Ega Winastwan dan Annisa Nur Fatwa (2020)	Strategi Perpustakaan Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Literasi Budaya Masyarakat	Sama-sama mengangkat tema strategi peningkatan literasi oleh perpustakaan.	Penelitian Rheza berfokus pada literasi budaya dan studi kepustakaan, sedangkan penelitian penulis membahas

				program sebagai inovasi layanan literasi berbasis implementasi program di perpustakaan daerah.
9	Nayla Meilany Putri, Widya Listiawati dan Ichsan Fauzi Rachman (2024)	Pengaruh Literasi Digital Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Konteks SDGS 2030	Sama-sama meneliti budaya literasi masyarakat.	Penelitian ini lebih deskriptif terhadap literasi digital, sedangkan penelitian penulis berfokus pada literasi program Ajar Pustaka.
10	Novia Tirta Sari, Nandang Rukanda dan Dewi Safitri Elshap (2024)	Peran Perpustakaan Dalam Meningkatkan Literasi Informasi Masyarakat Di Perpustakaan Desa Padalarang	Sama-sama menyoroti kontribusi perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat	Penelitian Novia berfokus pada literasi informasi di tingkat desa, sedangkan penelitian penulis berfokus

melalui kegiatan
pemberdayaan.

pada implementasi
program Ajar
Pustaka berskala
kabupaten dengan
pendekatan
kebijakan publik.



Berdasarkan referensi dari penelitian sebelumnya, *novelty* (kebaruan) dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap implementasi program Ajar Pustaka sebagai bentuk inovasi pelayanan publik berbasis literasi yang diinisiasi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Berbeda dari penelitian terdahulu yang hanya menyoroti peran, strategi, atau sinergi perpustakaan dalam meningkatkan literasi, penelitian ini secara khusus menelaah proses implementasi kebijakan publik dengan menggunakan teori Mazmanian & Sabatier (1983) sebagai dasar analisis. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor pendukung *good practice*, dan komunikasi dalam pelaksanaan program. Melalui pendekatan ini, penelitian menghadirkan perspektif baru yang memadukan konsep inovasi pelayanan publik dengan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran masyarakat (*community learning center*). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan model inovasi layanan literasi yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan bidang studi dan praktik yang membahas tentang bagaimana lembaga pemerintah dan organisasi publik mengelola serta menjalankan kebijakan untuk melayani kepentingan masyarakat (Nadjib & Khairunnas, 2016). Konsep ini mencakup berbagai aspek, termasuk teori, prinsip, dan praktik yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang efisien dan efektif. Sebagai disiplin ilmu, administrasi publik melibatkan kajian tentang teori dan praktik yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi publik, interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta mekanisme pelaksanaan kebijakan. Menurut Joko Sutanto (2020) dalam (Nadjib & Khairunnas, 2016), administrasi publik memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif. Cakupan bidang ini

sangat luas, meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap kebijakan publik. Dalam pelaksanaannya, administrasi publik tidak hanya berfokus pada urusan internal pemerintahan, tetapi juga pada hubungan dan kerja sama antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, administrasi publik menekankan pentingnya inovasi serta efisiensi dalam pemberian layanan kepada masyarakat, disertai prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, administrasi publik menjadi sangat relevan untuk menjawab berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks di era globalisasi.

Paradigma administrasi publik merupakan kerangka berpikir yang berfungsi untuk memahami dan mengelola dinamika pemerintahan serta pelayanan publik (Nadjib & Khairunnas, 2016). Paradigma ini tidak hanya mencakup aspek teknis dalam pengelolaan sumber daya, tetapi juga melibatkan nilai-nilai etika dan kepemimpinan yang memengaruhi kebijakan publik. Administrasi publik harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Terdapat beberapa paradigma yang berperan penting dalam administrasi publik, dan masing-masing memiliki karakteristik, asumsi, dan membawa dampak yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa paradigma utama dalam administrasi publik:

a. *Old Public Administration* (OPA)

Old Public Administration (OPA) atau administrasi publik lama mendapat sebutan demikian karena munculnya era-era administrasi publik yang lebih baru seperti *New Public Administration*, *New Public Management*, dan *New Public Service*. Menurut Thoha (2005), OPA juga dikenal sebagai administrasi publik tradisional, klasik, atau cikal bakal lahirnya studi administrasi publik. Woodrow

Wilson dan F.W. Taylor menjadi figur kunci dalam era ini. Wilson (1887) mengidentifikasi bahwa permasalahan fundamental administrasi publik terletak pada kurangnya kapasitas administratif dan kualitas sumber daya manusianya (Erika Revida & Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Marto Silalahi Muhammad Nurjaya, 2021) Solusi yang diusulkan adalah meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur administrasi. Wilson juga menekankan pentingnya netralitas administrasi publik dari pengaruh politik. Meskipun administrasi beroperasi setelah keputusan politik dibuat ("*when politics end, administration begins*"), pelaksanaannya harus dijalankan secara profesional tanpa campur tangan kepentingan politik. Karakteristik utama OPA (*Old Public Administration*) terletak pada penekanannya untuk memperkuat sifat-sifat yang terpisah dari ranah politik dan lebih mengarah pada pendekatan manajemen yang bersifat ilmiah. Namun, kelemahan utamanya adalah terbatasnya kontribusi administrasi publik dalam proses pembuatan kebijakan publik.

b. *New Public Administration* (NPA)

Pasca era *Old Public Administration* (OPA), lahirlah fase *New Public Administration* (NPA) yang juga dikenal sebagai periode neo-klasik. Era ini menandai diperkenalkannya konsep pentingnya pendekatan hubungan kemanusiaan yang harmonis (*human relations*) dalam interaksi antarindividu di lingkungan administrasi publik. Paradigma *new public administration* memiliki perbedaan dengan *old public administration*. Apabila *old public administration* berorientasi kepada *job centered* maka *new public administration* mulai menggagas perlunya *people centered*. Paradigma *new public administration* muncul sejak tahun 1960- 1970. Paradigma ini selain mengutamakan efisiensi dan efektivitas juga menerapkan keadilan sosial dan menghargai harkat dan martabat manusia sebagai

pelaksana administrasi publik. Oleh karena itu pendekatan pada new public administration adalah sosiologis dan psikologis. Dalam paradigma NPA (*New Public Administration*), evaluasi kinerja administrasi publik tidak dapat hanya diukur berdasarkan pencapaian aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas semata, melainkan juga harus mempertimbangkan dimensi keadilan sosial (*social equity*) sebagai nilai yang sama pentingnya (Erika Revida & Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Marto Silalahi Muhammad Nurjaya, 2021)

c. *New Public Management* (NPM)

New Public Management merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan administrasi publik yang diprakarsai oleh Osborne dan Ted Gaebler pada tahun 1992. Mereka mengusulkan konsep pemerintahan yang bersemangat kewirausahaan atau yang dikenal dengan istilah "*reinventing government*" yang didasari sepuluh prinsip fundamental untuk diterapkan dalam administrasi publik. Latar belakang kemunculan konsep *reinventing government* ini adalah untuk mengatasi berbagai ketidakefisienan yang terjadi dalam sistem administrasi publik, sehingga diperlukan sepuluh prinsip dasar yang harus diimplementasikan pemerintah untuk mencapai efisiensi. Paradigma *New Public Management* pada hakikatnya merupakan konsep yang mengoperasikan administrasi negara dengan menerapkan prinsip-prinsip sektor bisnis (Sudarmanto et al., 2020). Pendekatan ini bertujuan mengubah model konvensional yang cenderung lamban, kaku, dan birokratis menjadi sistem yang lebih responsif dan efisien. Konsep paradigma ini dikembangkan oleh David Osborne dan Ted Gaebler (1992) yang menekankan pentingnya jiwa kewirausahaan dalam sistem administrasi negara. Dalam prinsip ini, pemerintah tidak secara langsung menyelenggarakan pelayanan publik, melainkan sebisa

mungkin mendelegasikannya kepada masyarakat, sehingga peran negara berubah menjadi fasilitator atau pengawas dalam penyelenggaraan urusan publik. David Osborne dan Ted Gaebler mengidentifikasi 10 prinsip baru nilai-nilai kewirausahaan dalam lingkungan birokrasi publik, yaitu: 1) Pemerintah sebagai penggerak yang berperan mengarahkan, 2) Pemerintah milik rakyat yang memberikan kewenangan, 3) Mengintegrasikan kompetisi dalam penyediaan layanan, 4) Pemerintah yang didorong oleh misi, 5) Membiayai berdasarkan hasil, 6) Pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan, 7) Pemerintahan yang produktif, 8) Pemerintahan yang preventif, 9) Pemerintahan yang terdesentralisasi dengan mendorong partisipasi dan pembentukan tim kerja, 10) Pemerintahan yang berorientasi pasar. Kesepuluh prinsip ini menjadi fondasi dalam transformasi administrasi publik menuju sistem yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Tarumingkeng et al., n.d.).

d. *New Public Service* (NPS)

Paradigma *New Public Service* merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt melalui karya mereka berjudul "*The New Public Service: Serving, not Steering*". Paradigma ini mengkritik bahwa penerapan nilai-nilai bisnis dalam organisasi publik telah merusak nilai-nilai fundamental administrasi publik. Mereka berpendapat bahwa administrasi negara seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan demokratis. Sebagai contoh, pelayanan publik tidak boleh hanya berorientasi pada kepuasan pelanggan, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana memenuhi hak dan kewajiban publik secara menyeluruh. Paradigma ini memandang masyarakat bukan sebagai konsumen, melainkan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Janet V. Denhardt

dan Robert B. Denhardt merumuskan tujuh prinsip *New Public Service* menurut Alamsyah (2016): 1) Melayani Warga Negara, Bukan Pelanggan (*Serve Citizens, Not Customers*) Kepentingan publik merupakan hasil dari dialog mengenai nilai-nilai bersama, bukan sekadar kumpulan kepentingan individual. Oleh karena itu, pelayan masyarakat tidak hanya merespons permintaan pelanggan, tetapi fokus membangun kepercayaan dan kerjasama dengan dan di antara warga negara. 2) Mengutamakan Kepentingan Publik (*Seek the Public Interest*) Administrator publik harus mampu berkontribusi dalam membangun dan merumuskan kepentingan bersama masyarakat. 3) Mengutamakan Kewarganegaraan daripada Kewirausahaan (*Value Citizenship over Entrepreneurship*) Kepentingan publik lebih baik dijalankan oleh pelayan masyarakat dan warga negara yang berkomitmen memberikan kontribusi bagi masyarakat, daripada diserahkan kepada manajer wirausaha yang memperlakukan dana publik seolah-olah milik pribadi. 4) Berpikir Strategis, Bertindak Demokratis (*Think Strategically, Act Democratically*) Kebijakan dan program untuk memenuhi kepentingan publik harus dilaksanakan secara efektif dan bertanggung jawab melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif. 5) Mengakui Kompleksitas Akuntabilitas (*Recognize that Accountability is Not Simple*) Pelayan masyarakat harus lebih memperhatikan hal-hal yang lebih substansial daripada sekadar mekanisme pasar. Mereka harus memenuhi peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kemasyarakatan, norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga negara. 6) Melayani daripada Mengarahkan (*Serve Rather than Steer*) Sangat penting bagi pelayan masyarakat untuk menerapkan kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai bersama, bukan mengontrol atau mengarahkan masyarakat menuju nilai-nilai baru. 7) Menghargai

Manusia, Bukan Hanya Produktivitas (*Value People, Not Just Productivity*) Organisasi publik beserta jaringannya lebih mungkin mencapai kesuksesan jangka panjang jika dijalankan melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama yang didasarkan pada penghargaan terhadap semua individu (Widiastuti et al., 2025).

Penelitian ini termasuk dalam paradigma New Public Service (NPS) yang menekankan bahwa tugas utama pemerintah adalah melayani warga negara, bukan mengendalikan mereka sebagaimana pada paradigma sebelumnya. Program Ajar Pustaka yang dikembangkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga mencerminkan prinsip NPS karena melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan literasi, pelatihan, dan pengembangan keterampilan di perpustakaan. Dengan demikian, penelitian ini berada dalam paradigma New Public Service, karena menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam membangun budaya literasi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.2.2 Implementasi Program

Implementasi kebijakan adalah rangkaian proses lanjutan dari perumusan masalah yang dimulai sejak tahap identifikasi hingga tahap penerapan di lapangan (Faiqotunnisa et al., 2024). Implementasi kebijakan meliputi berbagai tindakan, baik oleh pemerintah maupun individu, yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan (Sutikno, 2020). Secara umum, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses penerapan berbagai aturan dan prosedur yang dikelola serta dijalankan oleh pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaannya (Sutikno & Yusuf, 2023). Para pelaksana kebijakan perlu memahami langkah-langkah yang harus dilakukan agar implementasi berjalan secara efektif. Selain itu, setiap keputusan dan instruksi kebijakan yang telah ditetapkan harus disampaikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang sebelum

dapat dilaksanakan (Setiono et al., 2024). Pelaksanaan implementasi menuntut aparat pemerintah untuk memiliki jejaring kerja dengan para pemangku kepentingan serta kelompok terkait lainnya agar dapat bersama-sama menjalankan kebijakan. Dengan adanya kerja sama tersebut, kebijakan yang diterapkan akan memberikan dampak yang lebih besar dalam proses pelaksanaannya (Saputra & Sutikno, 2022).

Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Mazmanian & Sabatier (1983). Menekankan bahwa keberhasilan implementasi tidak cukup diukur dari sejauh mana pelaksana menjalankan tugasnya, tetapi juga dari bagaimana kebijakan dirancang, seberapa kompleks masalah yang diatasi, dan apakah lingkungan kebijakan mendukung proses pelaksanaan. Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), efektivitas implementasi kebijakan dapat dilihat dari tiga variabel utama.

1. Sifat masalah (*tractability of the problem*), yaitu sejauh mana persoalan yang ditangani kebijakan dapat dipecahkan. Komponen ini mempertimbangkan tingkat kesulitan masalah, luasnya kelompok sasaran yang terdampak, serta potensi perubahan perilaku masyarakat melalui intervensi kebijakan. Semakin kompleks masalahnya, semakin besar tantangan bagi pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Kemampuan kebijakan dalam mengatur implementasi (*ability of statute to structure implementation*), yaitu sejauh mana kebijakan dirancang dengan baik sehingga dapat memandu proses pelaksanaan di lapangan. Aspek ini meliputi kejelasan tujuan yang ingin dicapai, ketersediaan sumber daya seperti anggaran dan tenaga pelaksana, struktur organisasi yang mengelola program, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan tetap berada pada jalur yang benar.
3. Variabel lingkungan yang mempengaruhi (*non-statutory variables*), yaitu faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali

pelaksana, namun memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi. Faktor tersebut dapat berupa dukungan politik dari pemerintah daerah, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, budaya dan kebiasaan lokal, opini publik, hingga kerja sama dengan pihak lain seperti komunitas dan lembaga pendidikan. Lingkungan yang mendukung akan mempermudah implementasi, sebaliknya lingkungan yang kurang kondusif dapat menjadi penghambat meskipun desain kebijakannya sudah baik.

Teori Mazmanian dan Sabatier dipilih dalam penelitian ini karena dinilai relevan untuk menganalisis pelaksanaan Program Ayo Belajar di Perpustakaan (Ajar Pustaka) yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Program ini melibatkan banyak aktor, mulai dari dinas terkait, pihak perpustakaan, sekolah, hingga masyarakat sebagai pengguna layanan. Selain itu, teori ini juga memungkinkan peneliti untuk melihat hubungan antara desain kebijakan, kondisi nyata di lapangan, serta faktor lingkungan yang mendukung program. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang mengalami kenaikan dari 54,69% pada tahun 2023 menjadi 70,33% pada tahun 2024, yang dapat diinterpretasikan sebagai salah satu indikator adanya dukungan lingkungan implementasi yang positif.

2.2.3 Inovasi

Kata inovasi berasal dari bahasa Inggris *innovation* yang berarti pembaruan atau sesuatu yang bersifat baru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), inovasi diartikan sebagai proses memperkenalkan atau menerapkan hal-hal baru, baik berupa gagasan, metode, maupun alat yang berbeda dari sebelumnya. Secara umum, istilah inovasi menggambarkan adanya tindakan atau upaya menciptakan kebaruan dalam suatu sistem, baik di lingkungan organisasi maupun dalam

kehidupan masyarakat (Munib et al., 2022). Dengan demikian, inovasi dapat dipahami sebagai suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk memperbaiki serta mengembangkan praktik tertentu guna mencapai tujuan yang lebih optimal. Menurut beberapa ahli:

- a. Van De Ven, Andrew H. menjelaskan bahwa inovasi merupakan proses pengembangan dan penerapan ide-ide baru oleh individu atau kelompok dalam periode waktu tertentu, yang melibatkan berbagai bentuk interaksi dan kegiatan di dalam suatu struktur organisasi.
- b. Everett M. Rogers mendefinisikan inovasi sebagai suatu ide, gagasan, objek, atau praktik yang dianggap baru dan diterima oleh individu atau kelompok tertentu untuk kemudian diadopsi serta diterapkan dalam kehidupan mereka.
- c. Stephen Robbins mengartikan inovasi sebagai gagasan baru yang digunakan untuk memulai, memperbarui, atau menyempurnakan suatu produk, proses, maupun layanan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan nilai suatu organisasi.

2.2.4 Literasi

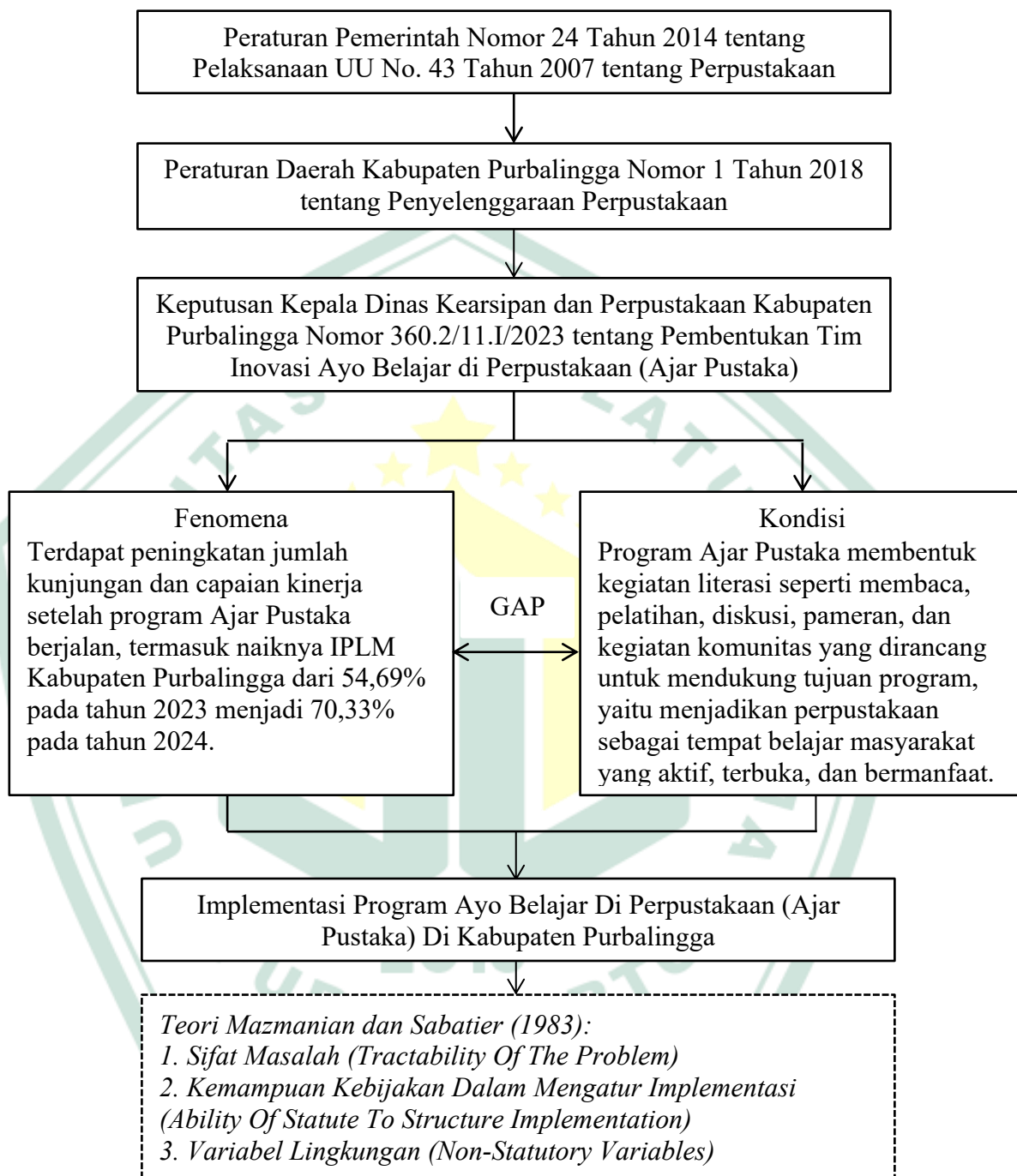
Literasi merupakan kemampuan dasar yang sebaiknya mulai dikembangkan sejak usia dini, yaitu pada anak-anak yang berada pada rentang usia 0 hingga 6 tahun (Ramdhayani, 2023). Secara umum, literasi diartikan sebagai kemampuan dalam membaca dan menulis. Namun, dalam konteks pemberdayaan masyarakat, literasi mencakup keterampilan untuk memperoleh, memahami, dan memanfaatkan informasi guna menghasilkan pengetahuan yang berguna bagi banyak orang (Sukmawati, 2023). Literasi menjadi dasar penting dalam proses pendidikan dan perkembangan individu di masa kini. Kemampuan literasi tidak hanya sebatas membaca dan menulis seperti yang dipahami secara umum, tetapi juga meliputi keterampilan dalam memahami, menelaah, serta memanfaatkan informasi di berbagai bidang kehidupan.

Menurut Suyono (2022), literasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi secara bijak melalui beragam kegiatan, seperti membaca, menyimak, menulis, berbicara, serta mengamati (Simamora et al., 2025).

2.2.5 Ayo Belajar di Perpustakaan (Ajar Pustaka)

Ayo Belajar di Perpustakaan (Ajar Pustaka) merupakan inovasi layanan publik yang diinisiasi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga sebagai upaya untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat. Program ini ditetapkan pada tanggal 2 April tahun 2023 melalui Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Nomor 360.2/11.I/2023 tentang Pembentukan Tim Inovasi Ayo Belajar di Perpustakaan (Ajar Pustaka) dengan tujuan menjadikan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran masyarakat (*community learning center*). Melalui program ini, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat peminjaman buku, tetapi juga sebagai ruang edukatif dan kreatif yang menampung kegiatan seperti pelatihan, bedah buku, pameran, lomba literasi, serta pembelajaran digital yang melibatkan berbagai komunitas dan lembaga pendidikan. Implementasi Ajar Pustaka sejalan dengan prinsip inovasi pelayanan publik yang menekankan peningkatan kualitas layanan, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan berbasis kebutuhan lokal. Dengan demikian, Ajar Pustaka mencerminkan penerapan paradigma New Public Service di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator, dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Purbalingga.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Olah Data Penulis

Keterangan:

Alur Berfikir: _____ Fokus Penelitian: _____